

KEGIATAN DPR-RI MINGGU PERTAMA OKTOBER 2011

Kegiatan DPR minggu pertama Oktober 2011, terfokus pada pelaksanaan fungsi-fungsi DPR untuk Masa Sidang I tahun 2011-2012. Berikut ringkasan kegiatan DPR pada minggu pertama Okt ber 2011.

Oleh: Ketua DPR RI, Marzuki Alie

Pelaksanaan Fungsi Legislasi

Beberapa Alat Kelengkapan Dewan (Baleg, Komisi, Pansus) telah melaporkan hasil pembahasan RUU kepada Rapat Bamus pada Kamis, 29 September 2011. Dari empat (4) RUU yang dilaporkan, yaitu: Laporan Mengenai Pembicaraan Tingkat I tentang RUU Bantuan Hukum; RUU tentang Rumah Susun; RUU tentang perubahan atas UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran; dan RUU tentang Sistem Peradilan Anak, hanya satu (1) RUU yang siap memasuki pembahasan tingkat II yaitu RUU tentang Bantuan Hukum yang ditangani oleh Badan Legislasi. Sedangkan RUU lain akan dijadwal ulang melalui keputusan Badan Musyawarah. Khusus untuk RUU atas perubahan UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, Komisi V yang ditugasi untuk menanganinya telah melakukan rapat-rapat kerja dengan Menteri Perhubungan, Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral, dan Menteri Hukum dan HAM, sepakat untuk melakukan pendalaman lebih lanjut mengenai perlu tidaknya mengubah UU no. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran. RUU tentang Peradilan Anak, belum diselesaikan Pembahasan Tingkat I, dan meminta perpanjangan waktu untuk menyelesaikan pembahasan.

RUU tentang Bantuan Hukum, rencananya akan dibawa dalam Rapat Paripurna DPR pada 4 Oktober dalam Pembicaraan Tingkat II (Pengambilan Keputusan). RUU tentang Bantuan Hukum ini mendesak untuk segera dilahirkan dengan pertimbangan, bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jami-



nan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Bahwa negara bertanggungjawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan. Bahwa pengaturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara harus berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan. Landasan-landasan tersebut merupakan pertimbangan utama untuk lahirnya UU tentang Bantuan Hukum.

RUU tentang Bantuan Hukum ini terdiri dari 12 Bab dan 25 Pasal. Adapun penjelasan umum atas RUU ini dapat dikemukakan sebagai

berikut: Hak atas bantuan hukum telah diterima secara universal yang dijamin dalam Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Pasal 16 dan 26 dalam Konvenan ini menjamin semua orang untuk memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi. Sedangkan Pasal 14 Ayat (3) Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik memberikan syarat terkait bantuan hukum yaitu: [1] kepentingan-kepentingan keadilan, dan [2] tidak mampu membayar advokat.

Meskipun bantuan hukum tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggungjawab negara, namun ketentuan Pasal 1 Ayat (30) UUD 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi HAM bagi setiap individu termasuk hak atas bantuan hukum. Penyelenggaraan pem-

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA : BAGIAN PEMBERITAAN DPR-RI, Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348,5715586, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: penerbitan@dpr.go.id; www.dpr.go.id/berita **PENGAWAS UMUM:** Pimpinan DPR-RI **PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH:** Dra. Nining Indra Saleh, M.Si (Sekretariat Jenderal DPR-RI) **WAKIL KETUA PENGARAH:** Achmad Djuned SH, M.Hum **PIMPINAN PELAKSANA:** Jaka Dwi Winarko **PIMPINAN REDAKSI:** Djustiawan Widjaya (Kabag Pemberitaan & Penerbitan) **WK. PIMPINAN REDAKSI:** Liber S. Silitonga (Kasubag Penerbitan), Mediantoro SE (Kasubag Pemberitaan) **ANGGOTA REDAKSI:** Dra. Trihastuti, Nita Juwita, S.Sos; Sugeng Irianto, S.Sos; Iwan Armanias; Suciati, S.Sos; Faizah Farah Diba; Agung Sulistiono, SH; **PENANGGUNG JAWAB FOTO:** Rizka Arinindya **SIRKULASI:** Supriyanto **Diterbitkan Oleh:** Bagian Pemberitaan Sekretariat Jenderal DPR-RI Sejak Mei 1991

berian bantuan hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Jaminan atas hak konstitusional tersebut belum mendapatkan perhatian secara memadai, sehingga dibentuknya UU tentang Bantuan Hukum ini menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga negara, khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan dihadapan hukum. Oleh karena itu, tanggungjawab negara harus diimplementasikan melalui UU tentang Bantuan Hukum ini.



Selama ini, pemberian bantuan hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Pengaturan mengenai pemberian bantuan hukum dalam UU ini merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin.

Beberapa pokok materi yang diatur dalam UU ini antara lain mengenai: pengertian bantuan hukum, penerima bantuan hukum, pemberi bantuan hukum, hak dan kewajiban penerima bantuan hukum, syarat dan tata cara permohonan bantuan hukum, pendanaan, larangan, dan ketentuan pidana.

Khusus mengenai RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar (P3L), Komisi IV DPR akan melanjutkan pembahasan dengan tetap mempertahankan konsep awal RUU mengenai keberadaan badan yang independen. Apabila terjadi *deadlock*, Komisi IV akan mengundang Menteri Kehutanan untuk membahas perbedaan yang terjadi. Dan mengundang para pakar untuk menyamakan persepsi terhadap perbedaan yang ada.

Pelaksanaan Fungsi Anggaran

Sesuai dengan Tata Tertib DPR dan mekanisme pembahasan, komisi-komisi dialokasikan waktu untuk membahas RUU APBN 2012. Untuk Komisi VII dan Komisi XI membahas dengan mitra kerja tentang Asumsi Dasar dalam RUU APBN 2012 sebagai masukan kepada Badan Anggaran dalam membahas RUU tersebut. Sedangkan Komisi I sampai XI membahas RKA-K/L 2012 dengan mitra kerjanya, untuk kemudian juga disampaikan kepada Badan Anggaran.

Komisi XI menyampaikan Kesepakatan Rapat Kerja antara Komisi XI dengan Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas dan BI kepada Banggar tentang Asumsi Dasar RUU APBN 2012 sebagai berikut: [1] pertumbuhan

ekonomi sebesar 6,7% atau sama dengan usulan Pemerintah, [2] inflasi sebesar 5,3% atau sama dengan usulan Pemerintah, [3] nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS sebesar Rp. 8.800 atau sama dengan usulan Pemerintah, [4] suku bunga SPN 3 bulan sebesar 6,4% lebih rendah dari usulan Pemerintah sebesar 6,4%.

Seangkan Komisi VII melakukan pembahasan mengenai asumsi dasar untuk harga *lifting* minyak dengan mitra kerjanya dalam minggu ini. Dalam RUU APBN 2012, Pemerintah mengajukan asumsi harga minyak sebesar US\$90 didasari dengan permintaan minyak dunia di tahun 2012 masih tinggi, dikarenakan pemulihan ekonomi dunia yang sedang berlangsung dan perkiraan persediaan-distribusi minyak dunia cenderung stabil yang diikuti dengan disiplinnya Negara OPEC untuk menjaga kapasitas produksi minyak. Sedangkan untuk asumsi *lifting* minyak, pemerintah mengajukan sebesar 950 ribu barel/hari dikarenakan optimisme Pemerintah akan pertumbuhan investasi di sektor Migas pada tahun 2012 dan optimalisasi sumber minyak yang ada.

Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

Pada tanggal 4 Oktober 2011, dalam Rapat Paripurna DPR, BPK-RI akan menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Semester I tahun 2011 kepada Pimpinan DPR-RI. Penyerahan laporan ini untuk memenuhi ketentuan UUD 1945 pasal 23E ayat (2), UU No. 12 tahun 2004 pasal 18 ayat (1) dan UU No. 15 tahun 2006 Pasal 7 ayat (1). Adapun hasil laporan ini akan dimuat dalam buletin berikutnya.

Kesimpulan Raker Tim pengawas DPR-RI terhadap tindak lanjut rekomendasi Panitia Angket DPR-RI tentang Pengusutan Kasus Bank Century. Setelah mendengar penjelasan dari Kapolri tentang penanganan ini, maka Tim Pengawas Century meminta agar Kapolri segera menuntaskan sisa berkas perkara kasus Bank Century yang belum P-21. Tim Pengawas Century juga meminta agar Kapolri berupaya terus mengoptimalkan untuk menuntaskan semua perkara

yang masih menjadi tanggungjawab Polri dan meningkatkan koordinasi dalam mempercepat proses *Mutual Legal Assistance* (MLA).

Konferensi Asian Parliamentary Assembly di Solo.

Pada tanggal 28-29 September 2011 DPR-RI menjadi tuan rumah penyelenggaraan *Asian Parliamentary Assembly (APA) International Conference on Principles of Friendship and Cooperation in Asia dan Ad Hoc Committee Meeting on Protection of the Rights of Migrant Workers in Asia*. Menariknya, parlemen-parlemen negara anggota APA, *observer* maupun tamu undangan lainnya tetap bersedia menghadiri konferensi ini walaupun beberapa hari lalu terjadi pemboman di kota Solo, Jawa Tengah. Kesediaan parlemen, *observer* maupun tamu untuk hadir merupakan salah satu bentuk apresiasi mereka terhadap kepentingan nasionalnya masing-masing mengingat pentingnya fokus pembahasan konferensi ini.

Pada konferensi ini, fokus pembahasan masih seputar memperjuangkan nasib pekerja migran di Asia. Bagi DPR sendiri, isu ini sangat penting mengingat kondisi nasib TKI yang semakin lama semakin memprihatinkan. Pada kesempatan ini, dihadirkan pula beberapa negara yang dinilai berhasil sebagai pengirim dan penerima TKI. Jadi, DPR dapat memainkan perannya untuk memperkuat kerja sama antar Parlemen negara-negara di Asia terkait dengan perlindungan TKI terutama dalam menjalin *Memorandum of Understanding* Perlindungan hak pekerja migran dan perjanjian *Mandatory Consular Notification* sehingga negara-negara lain dapat langsung menginformasikan kasus hukum yang

menimpa warga Indonesia di negaranya. Dengan demikian, diharapkan adanya pencegahan terhadap kasus-kasus TKI seperti kasus-kasus eksekusi TKI.

Dalam bidang legislasi, konferensi ini juga menjadi penting guna memperkaya pemahaman Parlemen mengenai pekerja migran terutama terkait dengan revisi UU No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Selain itu, Indonesia juga dapat mengajak negara anggota lainnya untuk menandatangani ratifikasi instrumen internasional mengenai *United Nations International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (UN ICRMW)* tahun 1990 karena sampai saat ini baru terdapat empat negara di Asia yang menandatangani, yakni Filipina, Sri Lanka, Timor Leste dan Indonesia.

Selain membahas isu tentang pekerja migran, konferensi ini juga membicarakan tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip Persahabatan dan Kerjasama di Asia. Prinsip Persahabatan dan Kerja sama ini merupakan hal yang sejalan dengan garis kebijakan luar negeri bebas aktif Indonesia dengan semboyannya *thousand friends, zero enemy*. Di samping itu, isu ini menjadi penting karena Benua Asia memiliki masyarakat yang sangat plural, dengan keragaman budaya, serta kondisi politik, ekonomi dan sosial yang berbeda-beda pula. Hal itu pula yang menjadikan alasan mengapa Solo terpilih sebagai tuan rumah. Solo merupakan salah satu kota yang memiliki keanekaragaman budaya, menjunjung nilai-nilai tradisional seperti tingkah laku yang sopan dan santun serta rasa toleransi umat beragama yang tinggi namun tetap mampu menghadirkan demokrasi yang berkualitas.



Konferensi APA Sepakati Deklarasi Solo

“Para delegasi telah menyetujui sebuah deklarasi yang bernama ‘Deklarasi Solo’ tentang persahabatan dan kerjasama di Asia,” ujar Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Hidayat Nurwahid usai menutup konferensi APA tersebut di Solo, Kamis (29/9).

Sejumlah pesan yang terkandung dalam “Deklarasi Solo” itu adalah APA memandang penting upaya mempromosikan dan memperkuat hubungan persahabatan serta kerjasama antarnegara di Asia berdasarkan prinsip kesetaraan dan saling menghormati kemerdekaan, integritas dan kedaulatan wilayah dan juga non-interferensi urusan domestik negara lain.

Pesan lainnya adalah APA memandang perdamaian dan keamanan abadi di kawasan Asia merupakan bagian dari tujuan utama persahabatan dan kerjasama di Asia.

“Dengan demikian parlemen di Asia diharapkan dapat mendorong penggunaan penyelesaian konflik secara damai dengan memajukan dialog. Sekaligus pula menegaskan pentingnya parlemen Asia untuk melindungi HAM termasuk aspirasi atas demokrasi hingga perlindungan hak para pekerja migran,” ujar Hidayat.

Deklarasi Solo itu juga menegaskan bahwa parlemen memegang peranan penting dalam mendukung berbagai prinsip itu dengan mengkonsolidasikan semangat yang ada, sekaligus memperkuat solidaritas berdasarkan aspirasi rakyatnya.

Selain Deklarasi Solo, konferensi APA juga menghasilkan draft “Resolution on The Protection and Promotion on The Right of Migrant Worker in Asia”.

Menurut Hidayat yang juga mantan Ketua MPR itu, delegasi Indonesia telah memperjuangkan kepentingan tenaga kerja Indonesia dengan memasukkan isu-isu yang penting kedalam

Konferensi internasional Asian Parliamentary Assembly (APA) di Solo, 28-29 September 2011, berakhir dengan disepakatinya “Deklarasi Solo” sebagai bagian dari kesepakatan para delegasi 17 negara yang hadir.



Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Hidayat Nurwahid (tengah)

draft resolusi tersebut.

Sejumlah isu itu diantaranya perlu adanya komitmen seimbang dan bertanggungjawab antara negara pengirim dan penerima pekerja migran, hingga seruan untuk meningkatkan kualitas pekerja migran dari negara pengirim demi meminimalisir potensi terjadinya pelanggaran HAM para pekerja migran di negara penerima.

“Draft resolusi juga mencerminkan pentingnya peran parlemen sekaligus dorongan untuk mereview legislasi terkait pekerja migran dan mendukung proses budgeting untuk program-program terkait. Langkah tersebut dilakukan untuk memberikan perlindungan yang utuh dan komprehensif bagi para pekerja migran,” ujarnya. (Tim) foto: ry/parle



Konferensi internasional Asian Parliamentary Assembly (APA) di Solo, 28-29 September 2011

DPR Dukung Ratifikasi Konvensi PBB tentang Penyandang Cacat

“Komisi VIII DPR akan memperjuangkan usulan persatuan penyandang cacat Indonesia (PPCI) untuk segera meratifikasi konvensi PBB,” kata Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan saat menerima 104 delegasi dari PPCI, di Gedung DPR, Selasa, (27/9).

Menurut Taufik, masukan dari PPCI menjadi pertimbangan untuk anggota dewan untuk segera meratifikasi Konvensi tersebut “Kita akan segera membahas ratifikasi tersebut dalam waktu dekat ini,” paparnya.

Hal senada disampaikan oleh Muhammad Oheo Sinapoy (F-PG), dia mengatakan, Indonesia akan segera menandatangani hasil ratifikasi konvensi PBB tersebut. Ratifikasi, lanjutnya, harus melihat UU lainnya sehingga apabila bicara mengenai disabilities maka UU lainnya pun harus memberikan perlindungan dan hak yang sama

DPR mendukung ratifikasi konvensi PBB tentang hak dan martabat penyandang cacat (disabilitas) guna memberikan perlindungan dan mengedepankan hak para penyandang cacat dalam berbagai bidang kehidupan.

untuk para penyandang cacat. “artinya jangan ada diskriminasi terhadap penyandang cacat,” jelasnya.

Menurutnya, diharapkan pada rapat paripurna yang akan datang RUU ini segera diagendakan. “Selain itu, kita akan memasukkan mengenai hak yang sama bagi disabilities perempuan dalam RUU pengarus utamaan Gender yang akan dibahas di Komisi VIII DPR,” tandasnya.

Selain itu, Komisi VIII DPR juga telah meminta Kementerian sosial memberikan anggaran bagi perempuan khususnya untuk penyandang cacat dalam anggaran mengenai pemberdayaan perempuan. “Jadi tidak lagi

memasukkan dalam anggaran yang sifatnya charity semata, itu cakupannya lebih kecil,” tambahnya.

Amran (F-PAN) mengatakan, harus adanya akses yang sama dari sisi pelayanan bagi para penyandang cacat dan berbagai fasilitas yang ada. “Kami akan terus mempertanyakan kepada pemerintah apakah ratifikasi ini bisa dijalankan nantinya,” katanya.

Ketua PPCI Siswadi mengatakan, Indonesia telah berperan serta dalam menggulirkan konvensi PBB mengenai penyandang cacat pada tahun 2005-2006. bahkan pada tingkat Asean sudah lima negara meratifikasi diantaranya Thailand, Malaysia, Laos dan Kamboja. “Semoga Indonesia menjadi negara kelima yang segera meratifikasi konvensi PBB ini,” harapnya.

Menurutnya, jika diaudit manfaat implementasi ratifikasi ini tidak lebih 5 persen. Karena itu PPCI mengusulkan agar adanya kesamaan isu dari kabupaten, maupun provinsi terhadap hak-hak dan martabat para penyandang cacat. “Daerah harus segera menyusun peraturan Daerah terkait penyandang cacat,” katanya.

Sementara dari sisi anggaran, lanjutnya, DPR harus peduli dan memberikan perhatian penuh agar mengalokasikan anggaran untuk penyandang cacat didalam DAU maupun DAK. “Kita mengharapkan adanya DAU maupun DAK bagi penyandang cacat,” jelasnya.

Selanjutnya, terangnya, yaitu adanya reward and punishment buat kabupaten yang telah mengalokasikan anggaran maupun memberikan perhatiannya terhadap hak dan kewajiban penyandang cacat. (si)/foto:iw/parle.



Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan saat menerima 104 Delegasi dari PPCI di Gedung DPR

Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nakal Harus Ditindak Tegus

Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) maupun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) yang melakukan pelanggaran ketentuan yang berlaku, harus dikenakan sanksi berupa peringatan hingga penutupan.

Ditegaskan Anggota Komisi VII Milton setelah melakukan Kunjungan Lapangan terkait dengan pendistribusian Bahan Bakar, di Provinsi Sumatera Utara, (26/11), Medan.

Kunjungan tersebut, menindaklanjuti laporan RDP Komisi yang membidangi Energi dengan BPH Migas. Komisi VII yang sangat konsen terhadap kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) nelayan, mendengar banyak kesimpangsiuran data, sehingga ada nelayan yang tidak mendapatkan BBM bersubsidi, serta ada BBM yang hilang tanpa bisa dipertanggungjawabkan, "Kami ingin cek apa benar data itu," katanya..

Kita tahu bahwa BBM bersubsidi untuk nelayan adalah suatu keharusan yang diberikan kepada nelayan, untuk dapat mencari nafkah. Laporan yang didapatnya telah sering terjadi kelangkaan BBM, namun menurut data kuota yang diberikan telah sesuai dengan kebutuhan nelayan setempat, dengan perhitungan data yang diperoleh dari Departemen kelautan dengan koordinasi Pertamina.

Milton menjelaskan, selain PT. Pertamina ada beberapa distributor BBM bersubsidi yaitu ada PT. AKR, jadi kita perlu melihat apakah kuota BBM solar subsidi yang disalurkan melalui PT. AKR sudah tepat sasaran.

Tim Kunjungan Spesifik yang dipimpin Sutan telah meninjau SPBN PT. AKR di dua tempat, mereka menemukan SPBN kosong, tanpa solar yang berada di HIU berada tepat di bibir pantai, namun di hijau berada di dekat sungai, dengan masih perlu menyeberang jalan, sehingga nelayan

Komisi VII DPR RI menginginkan Public Service Obligation (PSO) terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM) harus tepat sasaran, jumlahnya tidak boleh kurang dan harga sesuai dengan yang telah ditetapkan pemerintah.

yang ingin membeli solar, turun ke darat dengan menyeberangi jalan menggunakan derigen, sehingga control sulit dilakukan. Oleh karena itu perlu dilakukan penataan ulang tempat SPBN. Sehingga langsung kepada sentra nelayan. "Nelayan harus diberi prioritas jaminan untuk mendapatkan BBM solar bersubsidi. Karena hal ini berkaitan langsung dengan upaya peningkatan kesejahteraan nelayan," tegasnya.

Dilapangan terjadi ketidaksinkronan data. Diketahui dalam distribusi hingga dapat dinikmati nelayan, Dia menjelaskan Kementerian ESDM, BPH Migas yang menurut UU No.22 tahun 2001 diberikan hak untuk mengatur, dilapangan ada Pertamina yang

melaksanakan Publik Servis Obligation (PSO), disini lain diberi kesempatan kepada Swasta yaitu AKR dan Petronas.

Para pihak tersebut disamping DKP yang juga berkontribusi kepada suara nelayan. DKP juga perlu memenuhi kebutuhan infrastruktur nelayan selain solar, misalnya batu es dengan pabrik es.

Seharusnya jika kebutuhan solar naik maka akan berkolerasi dengan meningkatnya hasil tangkapan ikan. Dia juga mengharapkan adanya pembinaan dari DKP dan mengusulkan adanya survey musim ikan, sehingga tidak boros dengan adanya efisiensi. "Ada perencanaan dan sosialisasi yang baik dari KKP," imbuhnya. (as) foto:as/parle



Komisi VII DPR RI saat meninjau SPBU di Provinsi Sumatera Utara

Perusahaan Tambang Harus Kooperatif Renegosiasi Kontrak

Anggota Komisi XI DPR RI Kemal Azis Stamboel mengapresiasi perkembangan proses renegosiasi kontrak pertambangan yang terus dilakukan pemerintah.



Anggota Komisi XI DPR RI Kemal Azis Stamboel

“Pencapaian saat ini, dengan 65 persen dari seluruh perusahaan pertambangan yang telah menyetujui prinsip-prinsip renegosiasi kontrak adalah perkembangan yang positif. Kita minta semua perusahaan tambang yang beroperasi di Indonesia termasuk Freeport dan Newmont harus kooperatif untuk renegosiasi kontrak. Karena ini amanat Undang-undang, amanat seluruh rakyat Indonesia”, tegasnya di Jakarta, baru-baru ini.

Sebagaimana diketahui, pemerintah terus berupaya merenegosiasi seluruh kontrak karya pertambangan yang mencakup prinsip luas wilayah, divestasi, pengelolaan lingkungan, royalti, dan kewajiban menggunakan jasa dalam negeri sebagaimana diamanatkan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba. Bahkan pemerintah juga mengarahkan soal kewajiban alokasi distribusi produk tambang ke dalam negeri atau domestic market obligation (DMO). Kontrak karya pertambangan sebelumnya diatur dalam

UU No. 1 tahun 1967 dan UU No. 11 Tahun 1967 mengenai pertambangan. Namun, dengan dicabutnya UU tersebut maka seluruh kontrak karya yang ada harus mengikuti UU yang baru tersebut. Saat ini proses renegosiasi kontrak karya antara Pemerintah dan PT Freeport Indonesia berjalan sangat alot.

“Jumlah royalti yang diberikan dalam kontrak karya Freeport kepada pemerintah sebesar 1% adalah sangat kecil dan kurang adil. Untuk itu harus dinaikkan agar adil. Dan saya kira dengan kenaikan yang wajar Freeport juga tidak akan rugi. Paling tidak harus mengikuti PP No.45 Tahun 2003 tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku, untuk royalti emas sebesar 3,75% dari harga jual kali tonase. Jadi bisa sama-sama mendapat benefit,”katanya.

Dia menambahkan, sangat logis mengingat dalam laporan keuangan tahun 2010, Freeport menjual 1,2 miliar pounds tembaga dengan harga rata-

rata US\$ 3,69 per pound, atau dengan kurs Rp9.000 berarti setara dengan Rp39,42 triliun. Kemudian Freeport juga menjual 1,8 juta ounces emas dengan harga rata-rata di 2010 US\$ 1.271 per ounce, atau dengan kurs Rp9.000 berarti setara dengan Rp20,59 triliun. Jadi total penjualannya mencapai Rp60,01 triliun.

“Kalau hanya 1%, itu kan sangat kecil, padahal cost of production barang tambang terutama emas saat ini sangat rendah dibanding harga penjualan, hanya sekitar 30-60%. Sangat besar sekali proporsi yang dinikmati perusahaan tambang. Dan tren harga komoditas ini kedepan akan terus tinggi”, tambahnya.

Menurutnya, dikuatkan oleh fakta bahwa pendapatan negara dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor Pertambangan Umum sangat-sangat rendah, terutama jika dibandingkan dengan PNBP Migas.

“Tahun 2010 kita mencatat PNBP sektor pertambangan hanya 9,7 triliun rupiah sedangkan PNBP sektor Migas 151,7 triliun rupiah. Tahun 2011 target PNBP sektor pertambangan menjadi 15,4 triliun rupiah sedangkan PNBP sektor Migas 173,2 triliun rupiah. Hal ini terjadi karena besaran royalti yang kita terima sangat rendah. Fakta ini menunjukkan ada yang salah dengan sistem kontrak karya pertambangan kita sebelumnya. Dan ini harus segera diperbaiki”, jelas Anggota DPR dari Fraksi PKS ini.

Namun demikian, Kemal mengingatkan pemerintah untuk tetap berupaya mencapai win-win agreement antara kedua belah pihak dalam renegosiasi. “Yang penting renegosiasi harus benar-benar dilakukan, semua perusahaan tambang harus kooperatif. Negara dan rakyat juga harus diuntungkan, tetapi kepentingan pelaku usaha juga tidak dirugikan,”katanya. (si)foto:parle

DPR Minta Pemerintah Evaluasi Kontrak Kerjasama

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR meminta pemerintah dalam hal ini Ditjen Migas dan BP Migas untuk melakukan evaluasi terhadap kontrak-kontrak yang sudah berjalan, terutama terhadap masalah-masalah yang dispute atau masalah-masalah yang belum terselesaikan.

Demikian isi salah satu kesimpulan yang dibacakan oleh Ketua BAKN Ahmad Muzani saat RDP dengan Dirjen BP Migas di Gedung DPR, Jakarta, Selasa, (27/9).

Dalam kesimpulan lainnya, DPR juga meminta agar masalah ini dilakukan pembahasan dan koordinasi antara BP Migas, BPKP dan Ditjen Pajak agar permasalahan ini tidak berlanjut, dan BP Migas harus melakukan pendekatan-pendekatan kepada kontraktor-kontraktor (Kantor pusat) untuk menyelesaikan perpajakan migas.

Menurut Wakil Ketua BAKN Yahya Sacawiria, pemerintah dalam hal ini Dirjen Migas Kementerian ESDM serta BP Migas melakukan pendekatan terhadap kontraktor asing yang diduga memiliki masalah pajak yang belum terselesaikan.

“Berdasarkan laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, ada sisa uang yang belum dibayarkan dari kontraktor asing, yang berasal dari Inggris yang sudah mulai beroperasi sejak tahun 1990-an. Jumlah total sisa uang itu mencapai Rp 4 triliun,” ujar Yahya ketika diwawancarai.

Ia menambahkan, hal ini terjadi karena perbedaan pemahaman soal tax treaty. Kalau menurut kontraktor asing tersebut, kisaran tax treaty itu 10 persen. Sementara dari BPKP itu mencapai 20%. Begitu pun, ia menegaskan, masalah ini tidak terjadi pada kontraktor Amerika yang baru mulai



Wakil Ketua BAKN Yahya Sacawiria

beroperasi di tahun 2.000-an, setelah adanya undang-undang soal migas.

“Perbedaan persepsi ini perlu segera diselesaikan agar pemerintah juga tidak mengalami kerugian. Namun perlu dipikirkan pendekatan yang tepat agar kontraktor tidak serta-merta kabur dari Indonesia.” jelasnya.

Ia menambahkan, Dirjen Pajak menurutnya perlu cepat-cepat mengeluarkan surat keputusan pajak agar dana tersebut tidak lolos. “tidak tertutup kemungkinan kasus ini akan sampai masuk ke ranah hukum,” tegasnya.

Menurut Yahya, meski bagaimanapun, Indonesia berdaulat atas kekayaan mineral yang ada di buminya. Bila

hal ini dibiarkan berlarut-larut, justru pemerintah sendiri yang mengalami kerugian.

“Selain kehilangan sejumlah uang, juga bisa dianggap tidak mampu menjalankan fungsinya dalam pengelolaan energi. Masyarakat bisa menganggap jang-jangan sudah terjadi kebocoran dan penipuan,” terangnya.

Sekedar informasi, BAKN sebagai alat kelengkapan DPR RI yang bertugas mengawasi pengelolaan keuangan negara akan mencoba membantu mencari solusi agar Indonesia memperoleh uang yang merupakan haknya itu.(nt) foto:nt/parle

Komunikasi Solusi Tepat Atasi Permasalahan Tenaga Kerja Migran

Solusi ini disampaikan Wakil Gubernur Jawa Tengah Rustriningsih saat memberikan sambutannya pada pembukaan Asian Parliamentary Assembly (APA) International Conference on the Principles of Friendship and Cooperation in Asia and Ad Hoc Committee Meeting of the Protection of the Rights of Migrant Workers in Asia, Rabu (28/9) di Hotel Sunan, Solo, Jawa Tengah.

Rustriningsih mengatakan, Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi kantong TKI. Di salah satu pihak keberadaan TKI ini cukup membantu perekonomian masyarakat tetapi di lain pihak masih banyak pula keluhan yang disampaikan, bukan hanya permasalahan perlindungan dari tindak kekerasan selama bekerja di luar, tetapi juga keterbatasan komunikasi ataupun diskriminasi sosial.

Melalui komunikasi, kata Rustri, termasuk komunikasi teleconference secara berkala dan intensif bisa dikembangkan, sehingga pekerja akan lebih terkontrol, merasa aman dan kemungkinan munculnya kekerasan juga kecil.

Selain itu, komunikasi ini juga dapat mendorong motivasi pekerja untuk lebih meningkatkan produktifitasnya.

Oleh sebab itu, dia berharap Sidang APA yang diselenggarakan di Solo ini dapat memberikan solusi perlindungan ataupun jaminan bagi para pekerja antar negara peserta, agar para tenaga kerja migran yang bekerja mendapatkan rasa aman, nyaman dan produktif.

Pada kesempatan tersebut Rustri menegaskan bahwa situasi dan kondisi Jawa Tengah khususnya Solo, aman terkendali dan kondusif. Dari sisi sosial budaya, kultur dan masyarakat Jawa Tengah memiliki beragam seni dan budaya yang menarik beserta lingkungan sosial yang baik.

Surakarta, kata Rustri, merupakan salah satu kota budaya yang sudah maju. Hal ini bisa dilihat dari kultur sosial dan budaya Jawa yang adhi luhung

Salah satu solusi yang harus terus dikembangkan untuk mengatasi tenaga kerja migran adalah komunikasi antara pekerja, pemerintah daerah asal, perusahaan tempat bekerja serta pemerintah negara tempat bekerja.



Wakil Gubernur Jateng Rustriningsih



di Keraton Kasunanan Surakarta.

Disekitarnya juga cukup banyak destinasi wisata sejarah yang merupakan bukti tingginya seni, budaya dan kehidupan sosial masa lalu yang telah tertata dengan baik, seperti Candi Borobudur di Magelang atau Candi Prambanan di Klaten.

Di bidang ekonomi, Provinsi Jawa Tengah terus mengalami peningkatan yang positif. Geliat ekonomi masyarakat Jawa Tengah terus meningkat teru-

tama pada sektor pertanian dalam arti luas, UMKM dan industri padat karya.

Kondisi ini tentunya dapat menjadi masukan bagi komite-komite tetap APA, yaitu komite politik, komite sosial budaya dan komite ekonomi, sehingga dalam menentukan kebijakan disertai solusi permasalahan kemasyarakatan yang sedang berkembang ke depan agar kerjasama antar negara semakin baik. (tt) foto:ry/parle

Priyo Berharap Sidang APA Hasilkan Rekomendasi Kongkrit

Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso berharap Sidang Asian Parliamentary Assembly (APA) yang berlangsung selama dua hari di Solo dapat menghasilkan rekomendasi kongkrit yang bersifat implementatif dan dapat ditransliterasi menjadi kebijakan riil yang memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat di Asia.

Hal itu disampaikan Priyo pada Sidang Internasional APA, Rabu (28/9) di Hotel Sunan, Solo, Jawa Tengah.

Menurut Priyo, anggota Parlemen Asia memiliki tanggung jawab besar untuk mentransliterasi resolusi tersebut menjadi kebijakan kongkrit masing-masing Negara anggota APA. Dia juga berharap, secara riil mendorong penciptaan kesejahteraan masyarakat Asia.

Parlemen, kata Priyo, tentunya memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, pembuatan legislasi dan penentuan anggaran sehingga dapat memperkuat kemitraan dengan pemerintah dalam mengimplementasikan resolusi-resolusi yang dihasilkan APA.

Di tahun 2008, APA telah memulai dengan mendeklarasikan Prinsip Persahabatan dan Kerjasama di Asia.



Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso (kedua dari kanan) pada Sidang Internasional APA di Solo. Komitmen tersebut menurut Priyo harus diwujudkan secara terstruktur dan efektif melalui mekanisme kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial budaya dan keamanan yang ditumbuhkan berdasarkan prinsip keselarasan, saling menguntungkan, saling menghormati kedaulatan nasional dan penghargaan terhadap HAM.

Menurut Priyo, “Abad Asia” atau yang lazim dikenal dengan “The Asian Century” tidak akan memiliki dampak apapun bagi kesejahteraan masyarakat Asia jika kita gagal memetakan tantangan yang dihadapi Asia saat ini. Terlebih lagi jika kita tidak mampu memaksimalkan potensi kerjasama untuk menyelesaikan tantangan-tantangan tersebut. Karenanya tantangan-tantangan itu akan bisa dihadapi dan disingkirkan hanya melalui ker-

jasama yang kokoh. “Tanpa kuatnya kerjasama seluruh Negara di Asia, membangun Asia yang lebih kuat akan sia-sia,” katanya.

Priyo menambahkan, banyak tantangan yang dihadapi Negara Asia seperti kemiskinan, kelaparan, krisis pangan, perlindungan tenaga kerja migrant, korupsi, tata pemerintahan yang baik, kejahatan lintas batas, konflik teritorial hingga masalah kerusakan lingkungan yang merupakan sebagian dari permasalahan yang harus diselesaikan di kawasan ini.

Untuk itu dia mengingatkan seluruh anggota APA agar tidak terjebak dengan aktifitas monoton hanya memproduksi resolusi dan kesepakatan yang nyaris tanpa implementasi. “Kita tidak ingin mendapati resolusi-resolusi yang telah dibuat sejak tahun 2006 hanya menjadi macan kertas yang hanya garang di atas meja, tapi ompong dalam implementasi,” kata Priyo.

Dengan tekad dan kesungguhan dari seluruh anggotanya, Priyo optimis APA tumbuh menjadi organisasi yang kuat dan mampu menciptakan perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia.

Pasca konferensi ini, dia berharap komitmen APA sebagaimana yang tercantum dalam Deklarasi Prinsip Persahabatan dan Kerjasama di Asia akan terwujud dalam berbagai kerjasama konstruktif antarnegara dan masyarakat Asia atas dasar kesetaraan dan saling menghormati. (tt) foto:ry/parle



Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso (kiri) pada Sidang Internasional APA di Solo, Jawa Tengah

Kerjasama dan Kepercayaan Penentu Keberhasilan Asia

“Tidak seperti Eropa yang sangat homogen maka Asia terdiri dari bermacam-macam agama, etnis, sehingga nilai-nilai kerja sama yang diperlukan adalah nilai keterbukaan, kepercayaan, trust sama-sama paham bahwa kita di Asia saling bergantung satu sama lain. Saya sepakat dengan Pak JK, ia bicara bagus,” kata Wakil Ketua BKSAP DPR RI Nurhayati Ali Assegaf usai menyimak keynote speech yang disampaikan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam acara Konferensi APA di Solo, Jawa Tengah, Rabu (28/9/11).

Langkah kongkrit membangun saling percaya itu menurut Nurhayati sebenarnya sudah dimulai dengan mewujudkan Asean Community. Sedangkan lingkup yang lebih besar Asia sudah dimulai DPR dan parlemen negara lain pada kegiatan seperti Asian Parliamentary Assembly – APA yang tujuannya juga membangun kepercayaan dan kerja sama.

Sebelumnya Jusuf Kalla menekankan pilihan melihat ke kawasan sendiri sangat penting, karena kondisi global saat ini sudah berubah. Pada masa lalu ketika ada negara di Asia yang menghadapi krisis, kesulitan ekonomi dan sebagainya, ada kecenderungan berpaling ke Amerika dan Eropa untuk mendapat bantuan.

“Kita tidak bisa lagi mengharapkan bantuan Eropa dan Amerika, karena mereka membantu diri sendiri sekarang ini belum tentu bisa. Kita yakin ekonomi di Asia akan sangat berkembang itu akan jadi modal pokok untuk kerja sama,” tandas JK.

Ia kemudian mengajak anggota parlemen peserta konferensi untuk melihat potensi pangsa pasar 4 miliar penduduk benua Asia yang mencapai 60 persen penduduk dunia. Masing-masing negara memiliki kelebihan sendiri seperti sumber daya energi, sumber daya alam, teknologi, investasi dan lain-lain. Kelebihan itu apabila dipadukan akan menjadi kekuatan ekonomi yang akan mampu bertahan

Abad ke 20 sering disebut sebagai kejayaan Amerika, sebelum itu kejayaan Eropa. Sementara pada abad ke 21 ini banyak pihak memperkirakan akan menjadi keberhasilan Asia, tanda-tanda itu terlihat setelah Eropa dan Amerika semakin tidak berdaya menghadapi krisis berkepanjangan. Namun kejayaan Asia yang sangat plural ini baru dapat diraih apabila ada kerjasama yang dimulai dengan membangun saling percaya.

menghadapi imbas badai krisis yang terjadi di Eropa dan Amerika.

“Kita tahu krisis eurozone akan berlanjut, kita harus punya alternatif ekonomi yang kuat, yaitu Asia itu sendiri. Apabila kita tidak punya ekonomi yang kuat, ekonomi Asia akan terseret lagi krisis Amerika dan Eropa yang sedang berlangsung,” katanya. Ia mengingatkan krisis global tahun 2008, waktu itu Asia terkena imbasnya kecuali beberapa negara seperti Cina dan Indonesia. “Itu karena dua negara ini dapat bergantung pada kekuatan pasar sendiri.”

Kerjasama untuk memanfaatkan potensi pasar 4 miliar penduduk itu menurutnya harus segera dimulai dengan mengedepankan kerja sama ekonomi bukan politik. Pertimbangannya menurut JK karena ekonomi mengedepankan kepercayaan dan tidak dibuktikan satu sistem yang sama. Sedangkan kerja sama politik tidak mudah karena masing-masing negara punya sistem berbeda. Apabila dimulai dari situ akan diperlukan kerja sama sosial, menyangkut teknologi, masalah keamanan dan lain sebagainya.

Perlu dikembangkan pula kesadaran akan ‘the Asian Value’ yang beranjak dari pemahaman tidak mungkin bangsa-bangsa di kawasan Asia bekerja sama dengan pendekatan Eropa. Sebagai contoh demokrasi barat yang menganut paham ‘the winner take all’ tidak selalu cocok untuk orang Asia. Banyak negara di Asia berhasil dengan demokrasi yang digali dari budaya masing-masing yang juga dipengaruhi agama yang dianut. “Jadi pengembangan Asian Value ini perlu



Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla

lebih diintensifkan,” imbuhnya.

Ia menyadari beberapa wilayah di Asia masih menyimpan potensi konflik yang tidak kecil seperti di dua Korea, Filipinan, Thailand, Afganistan. Pengalaman menunjukkan konflik di negara tertentu selalu mempengaruhi negara tetangganya. JK yang pernah membantu upaya perdamaian di Filipina ini menyebut contoh, konflik di Indonesia yang sangat berpengaruh pada Filipina. Begitu ada operasi penangkapan separatisme mereka lari ke Filipina sebaliknya yang di Filipina juga lari ke Indonesia.

“Namun saya meyakini masalah konflik di kawasan ini hanya dapat diselesaikan dengan spirit Asia,” tegasnya. Tepuk tangan membahana di ruang sidang APA ketika JK mengakhiri pidatonya. (iky) foto:ry/parle

Disayangkan Ketidakhadiran Malaysia dan Arab Saudi dalam Konferensi APA

Konferensi Internasional Asian Parliamentary Assembly – APA yang diantaranya membahas Perlindungan Hak Pekerja Migran di Asia memang bukan pertemuan strategis yang derajatnya berada dibawah sidang komite eksekutif dan sidang umum.



Para Delegasi Negara anggota APA pada Sidang Konferensi APA di Solo, Jawa Tengah

“Iya Malaysia dan Arab Saudi tidak hadir dan tidak ada penjelasan kenapa, kita sayangkan ya. Namun sebenarnya kedua negara ini telah menyampaikan dukungan untuk membahas masalah migrant workers ini dalam pertemuan di Damaskus tahun lalu,” kata Azwar Abubakar Wakil Ketua BKSAP DPR RI usai penutupan Konferensi di Solo, Jawa Tengah, Kamis (29/9/11).

Ia menambahkan dalam pertemuan dua hari ini, diluar dugaan parlemen negara Arab lain seperti Kuwait, Yordania, Bahrain, Syria menyatakan dukungan penuh terhadap perlindungan hak pekerja migran. Disamping itu peserta konferensi banyak memperoleh masukan dari Hongkong seba-

gai salah satu negara penerima yang berhasil menyiapkan regulasi untuk menata masalah ketenagakerjaan termasuk pekerja migran.

Dalam laporannya ketua delegasi Hongkong, Miriam Lau Kin-yee menyebut ada dua regulasi yang mengatur baik pekerja lokal dan maupun migran yaitu the Employment Ordinance dan the Employees’ Compensation Ordinance. “Baik pekerja lokal maupun migran mempunyai hak yang sama sesuai keahliannya,” tandasnya.

Ia memberi contoh dalam peraturan pekerja migran punya hak untuk berserikat, dibolehkan berunjuk rasa dan melakukan kegiatan ibadah keagamaan dan budaya. Data terakhir bulan Maret 2010 migrant workers

yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga berjumlah 273.609 orang. Jumlah terbesar berasal dari Indonesia diikuti Filipina dan Thailand.

Dalam Employment Ordinance tugas diatur pembantu rumah tangga di Hongkong mendapat hari libur 1 hari dalam masa kerja 7 hari. Upah minimum juga ditentukan yaitu 3740 dolar Hongkong perbulan. Pembayaran dibawah standar mendapat sanksi denda 350.000 dollar Hongkong dan ancaman penjara 3 tahun.

Sementara juru bicara delegasi parlemen Yordania, Khaled Alfanatsah menyampaikan komitmen negaranya untuk memberikan perlindungan terhadap hak pekerja migran dari eksploitasi, kekerasan dan perdagangan manusia. “Kita bertanggung jawab melakukannya atas dasar agama, moral, tradisi dan hukum yang berlaku,” ujarnya.

Ketua delegasi parlemen Irak, Humam Baqer Abdulmaged hammoodi secara khusus mengutip hadis Nabi Muhammad yang menegaskan komitmen terhadap pekerja ; Bayarlah hak pekerja sebelum keringatnya kering. Walaupun negaranya belum meratifikasi konvensi PBB tentang buruh migran namun komit memberikan penghargaan kepada mereka. Saat ini menurutnya lebih dari 800.000 pekerja Banladesh bekerja di Irak.

Tercatat baru tiga negara Asia yang telah meratifikasi konvensi PBB tentang Perlindungan Hak Pekerja Migran yaitu Filipina, Sri Lanka dan Timor Leste. Sedangkan Indonesia baru menjadi negara penandatanganan. Proses ratifikasi di DPR menurut Azwar Abubakar dalam tahap persiapan. Saat ini Komisi IX yang membidangi tenaga kerja sedang fokus pada revisi UU Perlindungan dan Penempatan TKI di Luar Negeri. (iky)foto:ry/parle

Irak Puji Indonesia Tangani Buruh Migran

Delegasi Parlemen Irak memuji Indonesia dalam mengatasi dan menangani masalah buruh migran yang dipandang cukup bagus. Dalam Sidang APA ini diharapkan dapat dicapai keputusan-keputusan yang baik dalam menyelesaikan berbagai permasalahan buruh migran.

Hal itu disampaikan Ketua Parlemen Irak Humam Baqer Abdulmaged Hammoodi pada pertemuan bilateral Ketua DPR RI Marzuki Alie dengan Delegasi Irak di sela-sela Sidang APA, Rabu (28/9) di Hotel Sunan, Solo, Jawa Tengah.

Dalam pertemuan tersebut Humam mengatakan, Indonesia adalah negara besar dan memiliki pertumbuhan ekonomi yang bagus. Ditengah krisis ekonomi global Indonesia dipandang sebagai negara yang maju dalam bidang ekonomi, perdagangan, termasuk pembangunan politik dan demokrasi yang tumbuh dengan baik.

Dia mencatat ada dua hal penting terkait bilateral Irak-Indonesia. Pertama, kunjungan Delegasi Parlemen Indonesia ke Irak bulan Mei 2011, kunjungan tersebut memiliki arti yang besar bagi Irak, terutama tentang peranan dan perhatian Indonesia terhadap situasi yang sedang dialami Irak.

Hal penting ke dua, pembukaan kembali Kedutaan Besar Indonesia

di Bagdad yang akan memperlancar hubungan bilateral ke dua negara. Untuk semua hal tersebut, atas nama Pemerintah Irak, Humam menyampaikan penghargaan tinggi kepada Pemerintah Indonesia.

Dia berharap, hubungan bilateral ke dua negara yang telah dijalin hendaknya tidak hanya terbatas pada pemerintahan/negara, melainkan juga meliputi berkembangnya hubungan antara rakyat kedua negara.

Humam menjelaskan, kondisi Irak saat ini adalah merupakan warisan rejim yang lampau. Diperlukan waktu kurang lebih 20 tahun untuk mengembalikan konsidi Irak seperti semula.

Dalam membangun kembali negaranya, Irak sangat terbuka untuk pengembangan hubungan ekonomi, perdagangan, dan jasa. Dalam hal ini, Delegasi Irak berharap Ketua DPR-RI dapat membantu mempromosikan Irak di kalangan masyarakat bisnis Indonesia.

Indonesia juga diharapkan dapat

memberikan dukungan dan membantu Irak dalam hubungan dengan PBB, sebaliknya Irak akan membantu Indonesia dalam memberikan proteksi buruh migran.

Terkait akan diselenggarakannya sidang PUIC di Palembang 2012 mendatang, Delegasi Irak berjanji akan hadir dan berpartisipasi. Dia juga menyampaikan, dalam beberapa bulan ke depan Perdana Menteri dan Presiden Irak akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia.

Dalam pertemuan tersebut, Marzuki Alie mengatakan, Indonesia dapat memahami kondisi dan situasi yang dihadapi Irak dan berharap Irak dapat segera keluar dari situasi sulit yang dialami.

Marzuki sependapat, kerjasama kedua negara perlu ditingkatkan dengan melihat potensi yang dimiliki masing-masing negara. Seperti misalnya potensi kekayaan minyak Irak dapat membantu mengisi kebutuhan minyak Indonesia.

Marzuki menyambut baik niat Delegasi Irak untuk hadir pada sidang PUIC di Palembang, dan dia berharap partisipasi aktif dalam sidang tersebut. Karena, katanya, melalui forum ini kerjasama antar parlemen dapat ditingkatkan lebih lanjut.

Dalam menghadapi berbagai masalah internalnya, menurut Marzuki, sebaiknya negara anggota PUIC lebih mengutamakan penyelesaian diantara negara-negara muslim sendiri agar dapat lebih fokus dalam mencari solusi. Oleh karena itu forum PUIC hendaknya dapat diperbaiki peranan dan aktivitasnya dari waktu ke waktu.

Sementara menanggapi pertanyaan Delegasi Irak tentang adanya kendala teknis dan kendala regulasi dalam pengembangan hubungan ekonomi dan perdagangan, Marzuki berharap Dubes Irak untuk Indonesia dapat membantu menjembatani kesulitan dan hambatan dimaksud. (tt)foto:ry



Delegasi Parlemen Irak di Konferensi APA di Solo, Jawa Tengah

Pemerintah Harus Penuhi Kebutuhan BBM Subsidi Nelayan Indonesia

Anggota Komisi VII DPR RI meminta Pemerintah menjamin ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk nelayan. Pemerintah harus mencukupi berapapun kebutuhan nelayan Indonesia terhadap BBM bersubsidi.



Komisi VII saat mengunjungi pengisian BBM bersubsidi untuk nelayan di Sumatera Utara

Saat melakukan Kunjungan Spesifik Komisi bidang Energi di Provinsi Sumatera Utara, terkait distribusi BBM, Anggota Komisi VII Markum Singodimejo (F-PG) yang pernah bertugas di Komisi IV DPR yang membidang kelautan dan Perikanan mengatakan permasalahan bahan bakar untuk nelayan tidak kunjung selesai

Hal itu disebabkan banyak faktor, diantaranya model pembagian wilayah, jadi misalnya nelayan dari kabupaten A tidak diperkenankan beli di kabupaten B.

Selain itu, terkait penjatahan untuk BBM bersubsidi. Dia menyatakan kurang sependapat dengan sistem penjatahan ini. Karena sistem jatah,

SPBN sering kurang dalam mencukupi kebutuhan nelayan setempat, dan terkadang nelayan dari daerah lain ingin mengisi bahan bakarnya.

Selanjutnya, dia mengakui memang tidak dipungkiri kadang kala ada penyimpangan yang dilakukan oleh nelayan, namun menurutnya itu sangat kecil dan masih dianggap wajar dengan keuntungan yang diperoleh tidaklah besar, karena nelayan untuk mendapatkan BBM bersubsidi pun dibatasi dan terkontrol.

Contohnya nelayan membeli jatah BBM subsidi, namun nelayan tersebut tidak melaut dikarenakan suatu hal, kemudian dijual kepada pihak lain yang membutuhkan.

Permasalahan ini perlu diselesaikan dengan jelas dan tegas. Pemerintah harus mencukupi berapapun kebutuhan nelayan Indonesia terhadap BBM bersubsidi.

Kita harus mengetahui berapa jumlah dan jenis kapal yang ada di suatu daerah, sehingga jelas kepastian kebutuhan BBM di suatu daerah. Dan dia mengusulkan kuotanya diberikan sedikit kelebihan agar tidak terjadi kekurangan BBM untuk nelayan, karena penambahan kapal dan lalu lintas kapal dari luar kabupaten. (as)foto:as/parle

Swasta Laksanakan Distribusi BBM Bersubsidi Perlu Dikaji Ulang

Kebijakan Pemerintah memberikan izin perusahaan swasta dalam ikut melaksanakan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi perlu dikaji ulang, karena bertentangan dengan Undang-Undang tentang Keuangan Negara.

“Ini yang menjadi pemikiran Komisi VII, apakah hal tersebut telah dijalar yang benar. walaupun ada aturan yang mengaturnya dengan Peraturan Pemerintah 35 tahun 2004, namun tidak sejalan dengan UU tentang Keuangan Negara, Kata Sutan Sukarnotomo, saat memimpin Tim Kunjungan Spesifik di Provinsi Suma-

tera Utara, terkait distribusi BBM.

Dia menjelaskan UU lebih tinggi kedudukannya dari PP, maka UU dapat membatalkan peraturan yang ada di bawahnya. “Ini yang akan seera kita tinjau ulang,” tegasnya.

Setelah meninjau SPBN PT.AKR dan SPBU Petronas, Sutan menyayangkan perusahaan swasta memperoleh izin

dalam melaksanakan pendistribusian BBM bersubsidi. Dia menganggap hal itu akan menjadi wajar jika Pertamina tidak sanggup melakukan pendistribusian di suatu tempat tertentu. “kalau misinya ditempat-tempat Pertamina gak sanggup, mereka ditaro, itu ok gak apa-apa,” imbuhnya

Itu melanggar UU keuangan Negara bahwa swasta tidak bisa dan tidak boleh mengelola keuangan Negara yang dalam hal ini APBN. Walaupun ada PP No. 35 tahun 2004 yang mengizinkan swasta melakukan pendistri-



Komisi VII DPR RI saat meninjau SPBU di Provinsi Sumatera Utara

busian BBM bersubsidi. menurutnya PP ini bertentangan dengan UU Keuangan Negara, Kebijakan Pemerintah ini akan ditinjau oleh DPR.

Selain itu, dia juga mengkhawatirkan PT.AKR yang merupakan perusahaan swasta yang turut mendistribusikan BBM bersubsidi kepada nelayan, juga bergerak dibidang industri. "kita khawatir sebagian saja yang dijual ke publik, sebagian untuk kepentingan dia. Padahal jika untuk kepentingan industri harganya berbeda," jelasnya

Dengan petronas dikhawatirkan selain menjual BBM non PSO tetapi diberikan izin untuk menjual BBM PSO. "dikhawatirkan sebagian dijual sebagaimana mestinya, dan sebagian diblending menjadi BBM non PSO, akhirnya dia dapat bahan bakar murah, itu yang saya khawatirkan oleh karena itu saya tidak setuju," terangnya.

Hal itu dilakukan karena kita tidak dapat mengabaikan adanya penyalahgunaan atau lain sebagainya, bang kali ada-barang kali tidak. Jadi kita harus

menggunakan prinsip kehati-hatian.

Tidak Monopoli

Pandangan berbeda, Anggota Komisi VII Muhammad Syafrudin yang juga Tim Kunjungan Spesifik itu, setelah melakukan kunjungan berbagai tempat pendistribusian BBM di SPBU PT. Pertamina, PT.Petronas, maupun, SPBN PT.AKR.

Ada harapan yang berbeda, baik PT.Petronas maupun PT.AKR. Dia mencatat yang akan disampaikan kepada Pemerintah supaya ada keseimbangan antara PT.Pertamina, PT.AKR, maupun PT.Petronas, dan lain-lain yang telah dilegalkan oleh Pemerintah dalam rangka mendistribusikan kepada masyarakat. Walaupun persentasenya lebih banyak Pertamina.

Dia akan mengakomodasikannya dengan harapan perkembangan ekonomi lebih meningkat, pemilik juga dapat keuntungan, masyarakat juga

dapat menikmati kelancaran pendistribusian BBM.

Hal positif yang didapat tidak adanya monopoli dari satu perusahaan sehingga semuanya dapat memberikan pelayanan kepada publik .

Terkait dengan wacana adanya pembatasan atau pengaturan penggunaan BBM agar tidak terjadi overload penggunaan BBM bersubsidi, dia mengutip pernyataan Pemerintah yang mengatakan tidak dilakukan pembatasan tetapi yang paling penting adalah pengawasan. "Pengawasan yang sangat ketat antara Pemerintah Daerah, Pemilik SPBU, BPH Migas, Pihak Keamanan, yang mempunyai tanggung jawab masing-masing, agar kuota BBM bersubsidi tidak overload. Kalau terjadi overload akan terjadi permintaan yang akan terus berubah," paparnya.

Dia mengingatkan agar BBM bersubsidi tepat sasaran. "Sebuah himbauan yang harus ditaati bersama," tegas Rudi (as) foto:as/parle

Kalla Meyakini Teror Berkorelasi Dengan Peristiwa Sebelumnya

Mantan Wapres Jusuf Kalla meyakini setiap peristiwa teror yang terjadi pasti mempunyai korelasi kuat dengan latar belakang peristiwa lainnya yang juga telah terjadi di masyarakat.



Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla saat memberikan keterangan pada wartawan

“Selalu terjadi hubungan antara satu peristiwa,” ujarnya kepada pers sesuai menjadi pembicara dalam konferensi internasional parlemen negara-negara Asia (APA) di Solo, Rabu.

Kalla mencontohkan, aksi terorisme pasti mempunyai latar belakang adanya ketidakadilan, kemiskinan atau adanya pemahaman yang keliru atas ajaran-ajaran agama.

Karenanya, ia menambahkan, semua ancaman terorisme itu harus segera dicari siapa aktor-aktor yang ada dibelakangnya dan apapun alasannya. Semua aksi terorisme itu jelas melanggar hukum dan kemanusiaan.

Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu juga mengatakan bahwa dirinya sangat memahami bahwa kelompok teroris itu juga menyebarkan sistem maupun ajarannya. “Jadi apakah bom yang meledak sekarang ini apakah ada

kesamaan bom, ideologi dan lain sebagainya dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya, itu yang harus diselidiki,” katanya.

Lebih lanjut Kalla mengatakan bahwa pemerintah mempunyai tugas berat menyelesaikan persoalan terorisme itu dan hal itu bisa dilakukan antara lain dengan meluruskan pemahaman masyarakat yang keliru atas ajaran agamanya disamping membenahi berbagai ketidakadilan dan pemberantasan akar kemiskinan di masyarakat.

“Kalau masyarakat sampai kehilangan kepercayaan pada pemerintah, maka tidak akan ada kerpatuhan sosial,” ujarnya.

Saat ditanya seputar analisa yang mengkait-kaitkan peristiwa bom Solo dengan kerawanan di daerah-daerah lainnya seperti Ambon, Kalla mengatakan bahwa untuk Ambon juga

masih menyimpan persoalan lama. Letupan kecil yang terjadi disana bisa menjadi konflik besar dimasyarakat. “Karena itu perlu juga dicari bagaimana korelasinya,” ujarnya.

Demikian pula ketika ditanya tentang adanya konflik antara Badan Intelijen Negara dengan Polri yang dianggap kembali kecolongan dalam peristiwa Bom Solo, secara diplomatik Kalla menuturkan bahwa tidak ada konflik diantara dua institusi itu. Yang ada dan perlu dilakukan adalah tingkatkan koordinasi.

Pada kesempatan itu, Jusuf Kalla juga menampik adanya spekulasi maraknya kerawanan di masyarakat saat ini punya keterkaitan dengan pengesahan RUU intelijen yang terus tertunda-tunda.

“Tidak ada hubungannya itu dengan berbagai peristiwa saat ini. Sekarang RUU ini masih terus dibahas di DPR,” ujarnya. (Tim) foto:ry/parle

Ketua DPR Bezuk Korban Bom Solo

Usai membuka secara resmi Konferensi Internasional Asian Parliamentary Assembly (APA) di Surakarta, Jawa Tengah, Ketua DPR RI Marzuki Alie meluangkan waktu mengunjungi pasien, korban bom yang masih mendapat perawatan di Rumah Sakit Oen.



Ketua DPR RI meluangkan waktu mengunjungi pasien korban bom di Rumah Sakit Oen

“Kami sengaja hadir di sini untuk melihat langsung saudara kita yang menjadi korban akibat perbuatan terkutuk, jahat, dari orang yang sesat. Kami bersyukur sebagian pasien membaik, sudah kembali pulang, sebagian lagi dipastikan mendapat perawatan terbaik,” kata Marzuki kepada wartawan, Rabu (28/9/11).

Aksi bom bunuh diri di depan Gereja Bethel Injil Sepenuh, Solo terjadi 2 hari menjelang pertemuan delegasi parlemen dari beberapa negara Asia. Setelah melakukan koordinasi dengan Polda Jawa Tengah, DPR memutuskan tetap melangsungkan kegiatan. “Sekecil apapun, bom ini adalah perbuatan terkutuk, kita tidak boleh kalah. Kami bersyukur teman-teman parlemen negara lain yang sudah konfirmasi hadir tidak ada yang terganggu dan yang belum konfirmasi malah

ternyata juga hadir,” lanjutnya.

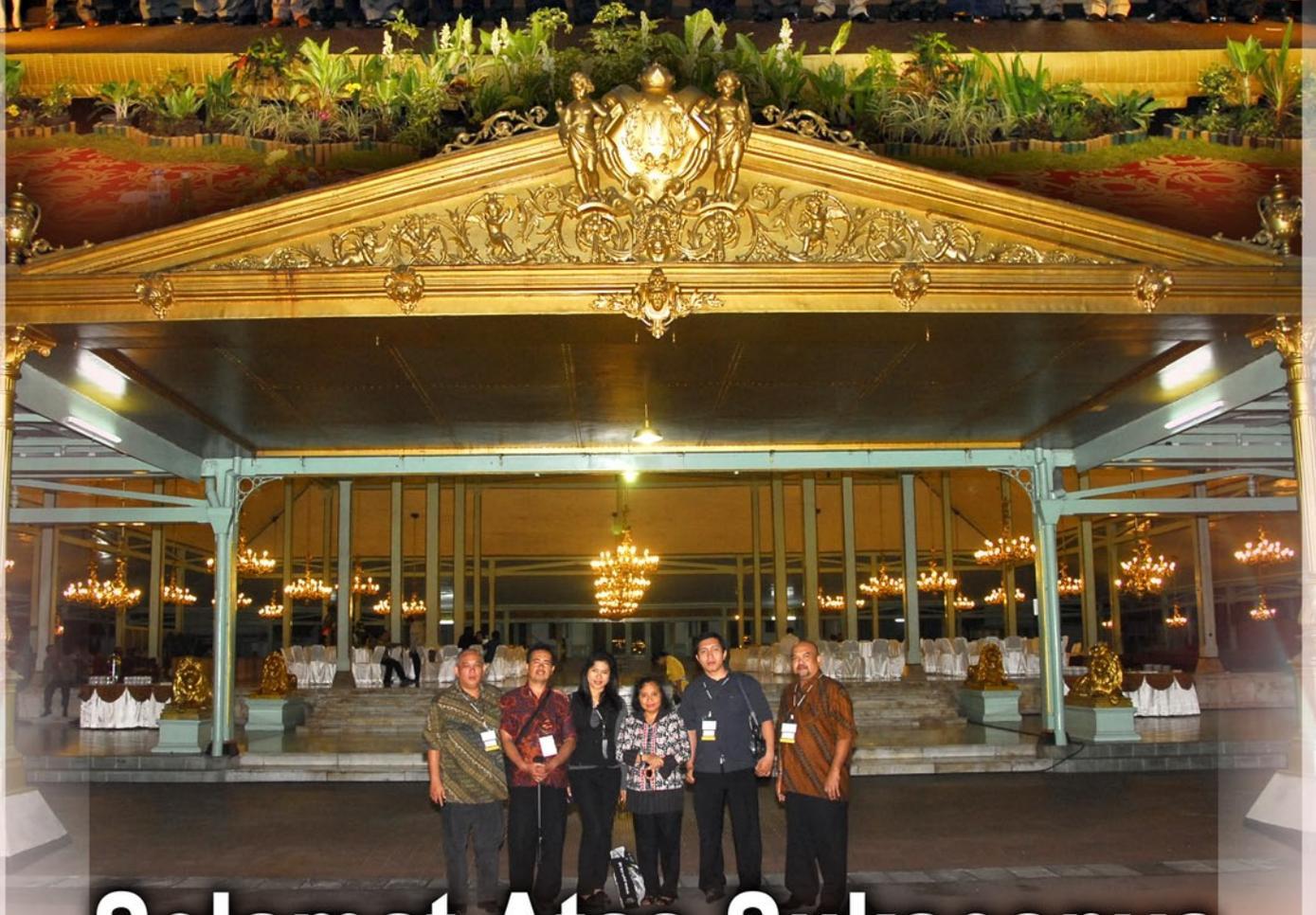
Ia juga menyebut aksi teror seperti ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di belahan dunia lainnya, termasuk di Eropa dan Amerika. Baginya yang paling penting adalah segenap pihak harus berkomitmen, bekerja sama, bahu membahu jangan kalah oleh teroris. “Kalau misalnya kita batalkan konferensi ini kemaren, nah kita kalah.”

Pada kesempatan itu Ketua DPR menyampaikan penghargaan kepada seluruh jajaran RS Oen Surakarta yang telah memberi perawatan kepada korban. Ia meminta pihak manajemen tidak ragu memberikan pelayanan terbaik karena negara dalam hal ini Pemerintah dan DPR sudah memberikan jaminan dukungan anggaran sampai korban sembuh.

Didampingi Ketua BKSAP DPR RI Hidayat Nurwahid, Ketua DPR berke-

sempatan mendatangi empat korban yaitu Feriana dan Restiono yang dirawat di ruang ICU serta Ferdian dan Defiana di ruang rawat inap. “Lekas sembuh ya, tidak usah difikirkan soal biaya semua ditanggung negara selama dirawat bahkan sampai proses kontrol setelah keluar rumah sakit,” katanya. Marzuki terlihat juga menyalami dan mengucapkan terima kasih kepada tim medis di ruang ICU yang dipimpin dr. Samuel.

Sementara itu dr. William Tanoyo manajer Penunjang Umum RS. Oen Surakarta menjelaskan dari 24 korban mendapat perawatan, 10 orang sudah dibolehkan pulang. Sejauh ini ada 1 pasien yang mendapat luka serius yang mengancam jiwa, namun setelah operasi keadaannya sudah membaik. Diperkirakan hari ini 3 pasien rawat inap lain juga dibolehkan pulang. (iky)foto:ry/parle



Selamat Atas Suksesnya Konferensi internasional Asian Parliamentary Assembly (APA)

di Solo, 28-29 September 2011